

## PENGGALIAN SUMBER DANA DALAM PENDIDIKAN

Oleh:

Asichul Inám, Sri Wahyuni, Binti Lailatul Wasi'ah, Ulifatur  
Rokhmaniah

Email: [asrofzahirul@gmail.com@gmail.com](mailto:asrofzahirul@gmail.com@gmail.com)

### Abstract:

Education is a tool used to change the behavior of someone from not knowing to understanding. Every education needs funds for operational continuity in the implementation of that education. This article aims to find out the extent to which education can obtain funding so that the implementation of education can run effectively. The results of this review suggest that funding for education can be obtained from government funds from both the APBN and APBD, student parents, the community, donors, alumni and companies. Community participation is very important to support the continuity of education for the better. Apart from that, community participation in supporting education can take the form of using available services such as enrolling their children in education, contributing to developing education, providing assistance in terms of energy, thoughts and material, supervising programs organized by educational institutions.

**Keywords:** *Multiplication, Sources of Funds, Education*

### Abstrak:

Pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk merubah prilaku seseorang yang semula belum tahu menjadi mengerti. Setiap pendidikan perlu adanya dana untuk keberlangsungan operasional dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pendidikan dapat memperoleh dana sehingga pelaksanaan pendidikan dapat berjalan efektif. Hasil tinjauan ini mengemukakan bahwa dalam pengalian dana dalam pendidikan dapat diperoleh dari dana pemerintah baik dari APBN maupun APBD, wali murid, masyarakat, donator, alumni dan perusahaan. Peran serta masyarakat sangatlah penting untuk menunjang

keberlangsungan pendidikan agar lebih baik. Selain itu peran serta Masyarakat dalam mendukung pendidikan dapat berupa menggunakan jasa pelayanan yang tersedia seperti memasukan anaknya kependidikan tersebut, berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan, memberikan bantuan baik tenaga, pikiran maupun berupa mareril, mengawasi program-program yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan.

**Kata Kunci:** *Penggalian, Sumber Dana, Pendidikan*

### PENDAHULUAN

Keuangan dan pembiayaan merupakan alih satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Setiap sekolah dituntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Sekolah mempunyai kewenangan untuk mencari dan memnfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada keterbatasan dana.

Manajemen pembiayaan dan keuangan merupakan hal penting dan subtansif yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian, manajemen ini diperlukan karena tidak mungkin suatu lembaga pendidikan bisa eksis tanpa pembiayaan yang kuat.

Di dalam makalah ini, penulis akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan sebagai investasi, sumber dan penggunaan biaya pendidikan, kiat lembaga pendidikan dalam pengalian dan pengelolaan dana, pemberdayaan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam pendidikan. Dengan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengalian sumber daya dalam pendidikan.

## PEMBAHASAN

### A. Pendidikan Sebagai Investasi

Investasi pendidikan merupakan alternatif investasi yang menguntungkan bagi suatu bangsa. Telah ditemukan secara konsisten dari berbagai penelitian di sejumlah negara bahwa investasi SDM melalui pendidikan memiliki dampak paling besar terhadap kemajuan negara-negara industri. Sebagai komponen dan jasa umum, karakteristik investasi pendidikan pada dasarnya tidak berbeda dengan investasi pada infrastruktur umum lainnya. Sebuah temuan menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi dari investasi pendidikan (rate of return) ternyata lebih tinggi dari pada investasi fisik dengan perbandingan rata-rata 15,3% dan 9,1%. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan sangat menguntungkan, baik secara sosial maupun ekonomi.<sup>1</sup>

Mengingat pentingnya investasi SDM melalui pendidikan, banyak pihak seperti pemerintah, masyarakat umum, keluarga dan individu merasa berkepentingan untuk melakukan investasi pendidikan. Dengan pendidikan, individu dan masyarakat akan tertata dengan baik, sehingga ketertiban, keamanan dan kesejahteraan individu dan masyarakat akan terwujud. Dalam masyarakat modern, investasi pendidikan semakin dirasakan sebagai suatu kebutuhan, bahkan suatu keharusan agar dapat mewujudkan kehidupan pribadi dan masyarakat yang lebih baik di masa depan.

SDM dianggap bernilai jika kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan hidup dan sektor pembangunan yang diberikan keuntungan, baik kepada individu maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Investasi pendidikan oleh pemerintah mencakup pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung sekolah, ruang kelas, penyediaan peralatan sekolah, pembayaran

P-ISSN: 2809-4506

E-ISSN: 2809-1264

<https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/cjmp>

Email: cerminjurnal@gmail.com

gaji guru, dan lainnya. Pembangunan sektor pendidikan oleh pemerintah masih dianggap sebagai pelayanan umum yang cenderung bukan bersifat *profil center*, sehingga wajar jika sampai saat ini anggaran pemerintah untuk pendidikan masih relatif rendah di bandingkan anggaran pendidikan di negara lain.

Bagaimana peran biaya dalam pendidikan? Biaya memiliki peran dan faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi biaya bukan syarat utama untuk menghasilkan keunggulan pendidikan.<sup>3</sup>

Sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

### B. Pendidikan Adalah Alat Untuk Perkembangan Ekonomi

Secara umum terbukti bahwa seseorang yang semakin berpendidikan maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas tersebut dikarenakan keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah perkembangan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan *life skill* dan *broad based education* yang dikembangkan di Indonesia pada akhir-akhir ini.

#### 1. Nilai balik pendidikan

Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja.

#### 2. Fungsi non ekonomi

<sup>3</sup> Akdon, Dkk, *Manajemen Pembiayaan*..... 86.

<sup>4</sup> Sudarmono Dkk, "Pembiayaan Pendidikan", *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol 2, No 1, 2001, 276-277.

<sup>1</sup> Akdon, Dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 85.

<sup>2</sup> Ibid., 85-86.

Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknik-ekonomis yaitu fungsi sosial kemanusiaan, politis, budaya, dan pendidikan.

## C. Sumber-Sumber dan Penggunaan Biaya Pendidikan

Sumber pembiayaan untuk sekolah terutama sekolah negri berasal dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin, yaitu gaji dan biaya operasional sekolah juga perawatan fasilitas (OPF), serta dana yang berasal dari masyarakat, baik yang berasal dari orang tua siswa, dan sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha.<sup>5</sup>

Perlu diingat bahwa dana sangat terkait dengan kepercayaan. Oleh karena itu, bila sekolah ingin mendapatkan dukungan dana dari masyarakat, maka program yang dibuat oleh sekolah harus menarik, bagus dan berjalan dengan baik serta bermanfaat luas. Dengan kata lain, sekolah harus mampu mengemas program dan meyakinkan pemilik dana.

Untuk memperoleh dukungan dana dari donatur sekolah, maka program pemimpin sekolah dapat melakukan hal-hal berikut:<sup>6</sup>

1. Pendekatan terhadap calon donatur.
2. Meminta saran atau pendapat calon donatur tentang program yang diajukan dalam proposal.
3. Berikan penjelasan yang meyakinkan bahwa banyak manfaat dari program yang diajukan.
4. Yakinkan bahwa sekolah yang diberi bantuan dapat dipercaya, sehingga jika diberi bantuan akan menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Untuk pengelolaan dan penggunaan dana oleh sekolah, maka sekolah dapat melakukan pengelolaan dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah dapat melakukan sistem akuntansi biaya yang baku dalam mengelola dana sekolah. Sekolah dikatakan sebagai organisasi

<sup>5</sup> Akdon, Dkk, *Manajemen Pembiayaan.....* 86.

<sup>6</sup> Ibid., 87.

nirlaba (*nonprofit*) karena sekolah menyediakan jasa-jasa yang diinginkan secara sosial tanpa mengharap keuntungan.

Sama halnya dengan pengelolaan keuangan dunia usaha, maka pengelolaan keuangan sekolah dapat menganut prinsip-prinsip yang lazim di mulai dari *budgeting*, *accounting*, dan *auditing*. Pelaksanaan akuntabilitas keuangan sekolah memerlukan kepercayaan dari masyarakat, dikelola secara transparan atau terbuka, sehingga mudah diakses oleh yang memerlukan datanya. Setelah *budgeting*, proses selanjutnya adalah akuntansi biaya dalam sekolah, karena sistem akuntansi biaya ini dapat menyajikan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sekolah.<sup>7</sup>

Jadi, sumber-sumber biaya pendidikan bisa berasal dari berbagai sumber diantaranya yaitu pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, penggalang dana, dll. Penggunaan biaya pendidikan meliputi: biaya pendidikan, biaya peralatan, biaya ekstrakurikuler, dan biaya lain yang terkait dengan proses belajar mengajar.

## D. Kiat Lembaga Pendidikan Dalam Penggalian dan Pengelolaan Sumber Dana

Pembiayaan pendidikan diartikan sebagai kumpulan uang yang diperoleh dan kemudian dibelanjakan untuk segala hal yang menyangkut tentang keperluan yang ada disuatu sekolah seperti kebutuhan sarana dan prasarana, gaji guru, kegiatan kokulikuler dan ekstrakulikuler, pengelolaan pendidikan, supervisi pendidikan dan lain sebagainya (Gamar, 2019).<sup>8</sup>

Menurut Sone didalam Mirela, et all. Sumber pembiayaan pendidikan secara garis besar terbagi menjadi beberapa sumber yang terdiri dari: Pemerintah, yang mencakup secara keseluruhan baik itu secara umum maupun secara khusus yang diperuntukan untuk hal-hal yang mencakup pendidikan tersebut. Orang tua

<sup>7</sup> Akdon, Dkk, *Manajemen Pembiayaan.....* 87-88.

<sup>8</sup> Tiarani Mirella, Dkk, "Penggalian Sumber Dana Pendidikan Di Sd Negeri Samirono Yogyakarta" Dalam Jurnal Shautut Tarbiyah Vol. 28 No. 1 2022, 39.

peserta didik, dan juga seluruh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan baik memiliki hubungan yang mengikat maupun tidak.<sup>9</sup>

Pembentukan pendidikan yang bersumber dari pemerintah yang tertera dalam UU dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>10</sup>

### 1. Dana BOS

Dana BOS Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk keperluan pendidikan dengan tujuan meringankan beban masyarakat dalam mengikuti proses pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA (Sudarmono et al., 2021).

Dana BOS dialokasikan kepada setiap elemen sekolah secara menyeluruh, meliputi: Penerimaan siswa baru, pengembangan koleksi dan manajemen dari perpustakaan sekolah, kebutuhan dalam pembelajaran kokulikuler, dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran yang harus rutin dilakukan, kebutuhan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan juga tenaga kependidikan, layanan daya dan juga layanan jasa, untuk pemeliharaan seluruh sarana dan sarana pendidikan, diperuntukan penyediaan multimedia pembelajaran, dan pembayaran guru ASN.

### 2. Dana Orang Tua

Dewan pendidikan dan komite sekolah diputuskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 pada tanggal 2 April 2002 yang termuat dalam keputusan Mendiknas menyatakan bahwasanya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan sebagai yang memberikan pertimbangan dalam lembaga pendidikan, menjadi pendukung dalam setiap kegiatan yang ada pada lembaga pendidikan, menjadi orang yang melakukan

P-ISSN: 2809-4506

E-ISSN: 2809-1264

<https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/cjmp>

Email: cerminjurnal@gmail.com

pengawasan terhadap setiap layanan dan kegiatan pendidikan, serta menjadi media yang menjadi penjalin hubungan sosial dan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintahan. (Hayani, 2015).

Komite juga mempunyai peranan yang penting dalam suatu lembaga pendidikan sehingga perannya tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Adapun peran tersebut tidak hanya sebatas dana saja namun juga dapat berbentuk fikiran dan juga tenaga yang sangat diperlukan oleh suatu lembaga pendidikan (Sumiyati, 2019). Terkait dengan sumbangan dana yang diberikan oleh komite sekolah tidaklah menjadi anjuran yang wajib, dana yang diberikan pun adalah dana suka rela yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pendidikan yang memerlukan bantuan dan disesuaikan dengan keputusan bersama (Septiana et al., 2018).

### 3. Dana Masyarakat

Pengumpulan dana dari masyarakat dimaksudkan untuk bantuan dan juga bentuk kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan baik secara fisik seperti gedung, meja, kursi, proferti, tanah dan lain sebagainya. Maupun berbentuk ide, saran, jasa/tenaga, yang mana hal itu secara langsung atau tidak langsung telah memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia Pendidikan (Fahrurrozi, 2016). Sebagai suatu lembaga pendidikan yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa peranan masyarakat maka harus terus melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pendidikan yang ada suatu instansi sekolah termasuk dalam proses pembiayaan pendidikan yang juga melibatkan masyarakat dalam rapat dan menjadikan masyarakat sebagai pengontrol jalannya pendidikan, dengan mengacu pada asas dapat dipercaya, jujur, mementingkan keputusan

<sup>9</sup> Nurul Hidayah, "Penggalian Sumber Dana Pendidikan" Dalam Jurnal *Educurio* Vol. 1 No. 2 2023, 662.

<sup>10</sup> Mirella, Dkk, "Penggalian Sumber Dana.... 39-41.

musyawarah, terbuka, disiplin dan lain sebagainya (Sopiali, 2018).

Apabila sekolah ingin mendapatkan dana dari BP3 atau komite sekolah maupun dari masyarakat, maka sekolah harus memiliki program yang bagus, sehingga mereka yang diminta dukungan dapat memberikan dukungan yang didasari oleh keyakinan terhadap keterlaksanaan dan keberhasilan dari program yang dibuat oleh sekolah. Dengan kata lain, sekolah harus mampu mengemas program dan meyakinkan pemilik dana. Sekolah dapat membuat proposal kegiatan, mengidentifikasi siapa orang atau lembaga yang dapat diminta bantuan, jelaskan kepada donatur atau calon donatur tentang manfaat dan keuntungan bagi sekolah dengan program yang akan dilaksanakan, misalnya tentang laboratorium komputer di sekolah.<sup>11</sup>

Setelah para donatur memberikan bantuan yang diinginkan oleh sekolah, maka sekolah perlu mengelola dana tersebut terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah dapat membuat sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan donator terhadap sekolah. Berikut ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam pengelolaan dana sekolah:<sup>12</sup>

- a) Penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan yang direncanakan. Setiap penyimpangan dari anggaran harus disertai alasan yang jelas dan meminta persetujuan kepada pihak yang berwenang sebelum dilaksanakan.
- b) Penggunaan anggaran harus se-efisien mungkin dan hindari terjadinya kecurigaan “penaikan harga” pembelian atau pengadaan barang.

- c) Hindari kesan bahwa sekolah sekedar menghabiskan dana, misalnya bila suatu anggaran dalam kegiatan dianggarkan 200.000,00, tetapi realisasinya habis 150.000,00, maka dana tersebut harus dihemat.
- d) Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan oleh yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e) Pemasukan dan pengeluaran uang harus tercatat secara tertib disertai bukti-bukti tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku.
- f) Bukti pengeluaran tersebut harus siap untuk diperiksa setiap saat, artinya siap dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. Hindari transaksi tanpa pencatatan yang lengkap.
- g) Administrasi keuangan harus dilakukan secara terbuka, artinya semua pihak yang terkait dapat melihat laporan keuangan tersebut.

## E. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan

Masyarakat adalah sekumpulan orang dengan berbagai ragam kualitas diri mulai dari yang tidak berpendidikan sampai pada yang berpendidikan tinggi. Kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya, makin baik pendidikan anggotanya, semakin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan dilingkungan keluarga dan lingkungan sekolah (Djaelani, 2013; Hasan, 2010).<sup>13</sup>

Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan atau peran serta seseorang dalam suatu aktivitas tertentu atau obyek tertentu. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah peran

<sup>11</sup> Akdon, Dkk, *Manajemen Pembiayaan*.... 88-89.

<sup>12</sup> Akdon, Dkk, *Manajemen Pembiayaan*.... 89.

<sup>13</sup> Heru Juabdin Sada, “Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam” Dalam Jurnal *Pendidikan Islam* Vol. 8 No. 1 2017, 118.

serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.<sup>14</sup>

Peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan memiliki posisi yang penting dan strategis. Hal tersebut diakui secara resmi dalam undang-undang atau peraturan setingkat menteri atau peraturan daerah. Menurut undang-undang sistem pendidikan nomor 20 tahun 2003 dalam bagian ketiga dan keempat tentang hak serta kewajiban masyarakat dan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 8, 9, 10 dan 11.

Pasal 6 ayat 6 menyatakan bahwa "Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan." Sementara pasal 46 ayat 1 menyatakan "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat."

Peran masyarakat menjadi penting dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS). Berdasarkan hal tersebut, upaya menggalang peran serta masyarakat bagi terlaksananya perlu di usahakan, di samping terlaksananya aspek-aspek lain dalam penyelenggaraan MBS.<sup>15</sup>

Jenis-jenis peran serta masyarakat untuk mendukung pendidikan di sekolah dapat dijelaskan sebagaimana yang diungkapkan oleh subakir dan sapari (2001):<sup>16</sup>

1. Peran serta hanya dalam menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, misalnya memasukkan anak ke sekolah.
2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga.
3. Peran serta dalam bentuk keikutsertaan, yang berarti menerima secara pasif apa yang telah diputuskan oleh pihak lain.

<sup>14</sup> Henni Sukmawati, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Dunia Pendidikan" Dalam *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Vol. 4 No. 1 2018, 72.

<sup>15</sup> Akdon, Dkk, *Manajemen Pembiayaan.....* 90.

<sup>16</sup> Ibid.

Misalnya BP3 (dewan/komite sekolah) memutuskan orang tua membayar iuran bagi setiap anak sekolah dan orang tua menerima keputusan ini dengan mematuhiinya.

4. Peran serta melalui adanya konsultasi mengenai hal-hal tertentu. Misalnya, tentang program sekolah dan pendidikan anak-anak mereka.
5. Keterlibatan dalam memberikan layanan tertentu biasanya sebagai mitra pihak lain. Misalnya, penyuluhan tentang gizi bagi anak sekolah.
6. Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan yang telah didelegasikan. Misalnya, penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan sebagainya.
7. Peran serta yang sebenarnya dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang. Misalnya, mereka terlibat dalam membicarakan dan mengambil keputusan tentang program dan kegiatan sekolah berikut pendanaannya.

Menurut purwanto (dalam Supriono dan Sapari, 2001:15), ada 3 jenis hubungan sekolah dengan masyarakat yang bisa dikembangkan yaitu: Hubungan edukatif, hubungan kultural dan hubungan institusional. Sementara pendapat lain tentang bentuk keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan dan program sekolah dapat berupa: buah pikiran atau ide, tenaga, keahlian atau keterampilan, dan harta benda. Dengan beberapa persyaratan yaitu:<sup>17</sup>

1. Adanya senasib dan sepenanggungan bahwa maju mundurnya sekolah berarti maju mundurnya masyarakat.
2. Keterikatan terhadap tujuan, bahwa tujuan pendidikan di sekolah adalah tujuan masyarakat di mana sekolah itu berada.
3. Adanya prakarsawan, yaitu diperlukan kepemimpinan baik dari pihak masyarakat maupun dari profesional, yang dapat menimbulkan motivasi untuk bekerja sama.

<sup>17</sup> Akdon, Dkk, *Manajemen Pembiayaan.....* 91.

4. Adanya iklim atau suasana yang baik, hubungan antar anggota masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, saling menghargai, tidak saling mencurigai, iri hati, dan sebagainya.

Manfaat yang dapat dipetik dari keterlibatan orang tua dalam kegiatan program sekolah mencakup manfaat bagi siswa sebagian peserta didik, orang tua dan sekolah sendiri. Berdasarkan hasil penelitian di diklat Manitoba, Amerika Serikat pada tahun 1994, diperinci manfaat sebagai berikut:<sup>18</sup>

a) Manfaat bagi siswa, termasuk:

- 1) Memperbaiki hasil akademik.
- 2) Memperbaiki perilaku siswa di sekolah.
- 3) Meningkatkan motivasi belajar.
- 4) Menurunkan angka putus sekolah.

b) Manfaat bagi orang tua siswa, termasuk:

- 1) Meningkatkan rasa kepuasan, harga diri, dan percaya diri.
- 2) Memunculkan gagasan baru untuk menolong anaknya belajar sebagai hasil dari bekerja di lingkungan sekolah.
- 3) Menambah pengetahuan tentang perkembangan anak.
- 4) Memperkuat jaringan kerja sosial.
- 5) Memperluas kesempatan untuk terlibat dengan masyarakat dan jaringan kerja lainnya.
- 6) Meningkatkan pengawasan terhadap lingkungannya.
- 7) Hubungan yang baik dengan sekolah.

c) Manfaat bagi guru dan sekolah, termasuk:

- 1) Sekolah berpengalaman lebih baik dengan orang tua dan hubungan masyarakat, seperti adanya dukungan dan penghargaan dari masyarakat.
- 2) Sekolah dapat memfasilitasi guru-gurunya dengan lingkungan kerja yang lebih baik.
- 3) Sekolah menerima bantuan dari luar untuk melaksanakan program-program harianya dari bantuan tutorial dan

hingga usaha peningkatan dana sekolah.

- 4) Sekolah dapat mengalami program akademik dan sosial yang lebih efektif.
- 5) Sekolah dapat menghemat dana dengan meningkatkan keterlibatan orang tua.

Kerja sama antara sekolah dan masyarakat merupakan salah satu langkah penting dalam penerapan MBS. Tanpa adanya kerja sama antara sekolah dan masyarakat dalam bentuk jaringan kerja (*Networking*), maka tidak mungkin menuju sekolah yang bermutu baik. Ada berbagai cara dan media yang dapat digunakan untuk menjalin kerja sama sekolah dengan masyarakat agar hubungan terus bertahan. Menurut muslim, dkk (dalam Supriono dan Sapari, 2001:19), gara-gara tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) Berkirim surat.
- b) Bersilaturahmi atau pertemuan.
- c) Terlibat dalam kegiatan.
- d) Datang berkunjung ke rumah siswa.
- e) Bertelepon.
- f) Menghadiri rapat.
- g) Mengikuti kegiatan sekolah dan mengadakan pameran.

## PENUTUP

Investasi pendidikan merupakan alternatif investasi yang menguntungkan bagi suatu bangsa. Mengingat pentingnya investasi SDM melalui pendidikan, banyak pihak seperti pemerintah, masyarakat umum, keluarga dan individu merasa berkepentingan untuk melakukan investasi pendidikan. SDM dianggap bernilai jika kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan hidup dan sektor pembangunan yang diberikan keuntungan, baik kepada individu maupun masyarakat.

Sumber pembiayaan untuk sekolah terutama sekolah negri berasal dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin, yaitu gaji dan biaya operasional sekolah juga perawatan fasilitas (OPF), serta dana yang berasal dari

<sup>18</sup> Akdon, Dkk, *Manajemen Pembiayaan*.... 91-92.

<sup>19</sup> Akdon, Dkk, *Manajemen Pembiayaan*.... 92.

masyarakat, baik yang berasal dari orang tua siswa, dan sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha.

Pembiayaan Pendidikan sebagai kumpulan uang yang diperoleh kemudian dibelanjakan untuk segala hal yang menyangkut tentang keperluan yang ada disuatu sekolah seperti kebutuhan sarana dan prasarana, gaji guru, kegiatan kokulikuler dan ekstrakulikuler, pengelolaan pendidikan, supervisi pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah yang tertera dalam UU terdiri dari: dana bos, dana orang tua, dana masyarakat.

Peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan memiliki posisi yang penting dan strategis. Peran masyarakat menjadi penting dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS). Berdasarkan hal tersebut, upaya menggalang peran serta masyarakat bagi terlaksananya perlu di usahakan, di samping terlaksananya aspek-aspek lain dalam penyelenggaraan MBS.

## DAFTAR REFERENSI

- Akdon, dkk. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Hidayah, Nurul. "Penggalian Sumber Dana Pendidikan" dalam Jurnal *EduCurio* Vol. 1 No. 2. 2023.
- Mirella, Tiara, dkk. "Penggalian Sumber Dana Pendidikan di SD Negeri Samirono Yogyakarta" dalam Jurnal *Shautut Tarbiyah* Vol. 28 No. 1. 2022.
- Sada, Heru Juabdin. "Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam" dalam Jurnal *Pendidikan Islam* Vol. 8 No. 1. 2017.
- Sudarmono, dkk. "Pembiayaan Pendidikan", dalam Jurnal *Manajemen pendidikan dan ilmu sosial* Vol 2, No 1. 2001.
- Sukmawati, Henni. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Dunia Pendidikan" dalam Jurnal *Pendidikan dan Studi Islam* Vol. 4 No. 1. 2018.